

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat bagi pelaku tindak pidana yang dahulu dikenal dengan sebutan “penjara” kini telah berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” (LP). Hal itu dikarenakan perlakuan yang diterima Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemenjaraan dianggap sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, serta tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberadaan sistem pemasyarakatan yang baru ini diharapkan para pelaku tindak pidana yang berada di bawah binaan LP dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain alasan di atas, perubahan kata “penjara” menjadi “LP” dikarenakan adanya pemikiran dari Sahardjo sewaktu menjadi Menteri Kehakiman dan pada saat penerimaan gelar Doctor Honoris causa di Universitas Indonesia tahun 1963. Ia menyatakan bahwa “narapidana

adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat”. Tujuan pemasyarakatan untuk memperbaiki kehidupan sosial narapidana yang hidup di balik tembok penjara¹.

Narapidana sebagai penghuni LP berhak mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang adil, karena mereka bukan hanya objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Pembinaan yang mereka dapatkan berupa pembinaan jasmani dan rohani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak lain maupun keluarga, dan lain sebagainya.

Hak-hak yang diterima para narapidana ini ternyata tidak memuaskan sebagian narapidana yang ada di dalam LP, dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi atau pembedaan perlakuan yang diterima oleh penghuni LP. Pembedaan yang mencolok terjadi antara penjahat konvensional seperti pencuri, pembunuh, pemerkosa, dan penganiaya dengan elemen elite yang terlibat dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi dan suap-menyuap, atau antara narapidana yang mempunyai kedudukan tinggi (jabatan) di pemerintahan / narapidana yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dengan narapidana yang tidak mempunyai kedudukan / kemampuan ekonomi rendah. Temuan tersebut sebenarnya hanya membenarkan beberapa dugaan dan temuan

¹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 44.

sebelumnya, yang menyebutkan diskriminasi hukum bukan hanya terjadi saat masih dalam proses peradilan (penyidikan hingga vonis pengadilan), melainkan juga sampai ke tingkat pelaksanaan hukuman penjara².

Diskriminasi terhadap tahanan yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) ataupun LP bukan hal baru. Peristiwa seperti itu sudah lama terjadi di seluruh Indonesia, hanya saja baru akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik ketika Satgas Mafia Peradilan yang dibentuk pemerintah melakukan sidak ke Rutan Pondok Bambu, dan mendapatkan adanya tahanan yang diistimewakan³. Salah satu tahanan yang diistimewakan adalah Arthalita Suryani, terpidana tindak pidana korupsi, yang menempati ruang tahanan seluas 3,5 meter x 6 meter. Di ruangan Arthalita ini terlihat fasilitas-fasilitas mewah seperti televisi flat 21 *inchi*, pendingin ruangan *portable* dan tempat tidur *spring bed double*. Selain itu ada juga alat kebugaran, meja rias, dan kamar mandi dalam dengan toilet duduk.

Dibandingkan dengan ruangan tahanan lain hanya berupa kamar yang berisikan 12 hingga 15 orang tahanan, tidak memiliki *televisi* dan hanya memakai kipas angin. Tempat tidurnya hanya berupa kasur busa tipis. Dan para tahanan jika ingin mandi harus bersama-sama diluar kamar, karena tidak ada kamar mandi pribadi seperti yang dimiliki Arthalita.

Peristiwa yang terjadi di LP seperti itu bertolak belakang dengan ketentuan di dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik

² <http://bataviase.co.id/detailberita>, tanggal 11 Maret 2011

³ <http://www.waspada.co.id/>, *diskriminasi-tahanan-lp-bukan-hal-baru*, tanggal 16 Desember 2010

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga berlaku bagi masyarakat yang sedang menjalani masa pidana di Rutan atau LP.

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Kajian Perlakuan Diskriminatif terhadap Pembinaan Narapidana di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Klas IIA Wirogunan Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan diskriminatif terhadap narapidana di lingkungan LP Wirogunan?
2. Bagaimana upaya LP Wirogunan untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif di lingkungan LP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan diskriminatif terhadap narapidana di lingkungan LP Wirogunan.

2. Untuk mengetahui upaya LP Wirogunan untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif di lingkungan LP.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu untuk mendapatkan data sebagai bahan penulisan hukum.
2. Bagi ilmu pengetahuan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, mengenai adanya perlakuan diskriminatif terhadap narapidana yang terjadi di dalam LP.
3. Bagi masyarakat yaitu memberikan sumbangan pikiran kepada seluruh masyarakat mengenai adanya perlakuan diskriminatif terhadap narapidana yang terjadi di dalam LP.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “KAJIAN PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN” ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Adapun apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai perlakuan diskriminatif terhadap narapidana, khususnya di lingkungan Lapas Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis mengenai Kajian Perlakuan Diskriminatif terhadap Pembinaan Narapidana di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang⁴.
- b. Diskriminatif adalah bersifat diskriminasi⁵.
- c. Pembinaan adalah segala macam usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada dalam diri manusia.
- d. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7) adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- e. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Jadi perlakuan diskriminatif terhadap pembinaan narapidana di lingkungan LP adalah perbuatan yang bersifat diskriminasi yang dikenakan terhadap terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan menumbuhkan, meningkatkan,

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 269.

⁵ *Ibid.*, hlm. 628.

mengembangkan potensi yang ada dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan pustaka lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu:

- a. Kepala Lapas Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.
- b. Narapidana penghuni Lapas Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif,

yaitu penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: Pembahasan

Berisi Tinjauan Umum Perlakuan Diskriminatif Narapidana, Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan, Kajian Perlakuan Diskriminatif terhadap Pembinaan Narapidana di Lingkungan LP Wirogunan Yogyakarta.

BAB III: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.